

**SKRIPSI**  
**ANALISIS DIPLOMASI INDONESIA DALAM MERAIH**  
**PRESIDENSI G20 2022**



**MOHD NAZRIE**

**F0218511**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**  
**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2023**

## ABSTRAK

Terpilihnya Indonesia menjadi Presidensi G202022 merupakan harapan besar bagi Indonesia untuk bisa bangkit dari ketidak stabilan ekonomi pasca serangan Covid-19 sejak tahun 2019-2021. Serangan Covid-19 ini membuat stabilitas ekonomi negara-negara di dunia menjadi tidak stabil termasuk Indonesia. Hadirnya pertemuan G20 di Indonesia bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan pertemuan ini sebagai bagian dari membangun kembali ekonomi yang stabil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diplomasi Indonesia dalam meraih Presidensi G20 2022 serta untuk menganalisis kepentingan Indonesia dalam meraih Presidensi G20 2022. Penelitian ini menggunakan dua konsep utama untuk mendukung analisis penulis yakni konsep diplomasi multilateral dan kepentingan nasional (*national interest*). Metode yang diigunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan jenis penelitian dekskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur bersumber dari buku, jurnal, skripsi, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia dalam meraih presidensi G20 2022 mengarah pada pemanfaatan diplomasi ekonomi yang dilakukan. Forum G20 secara tidak langsung memberikan peluang dan potensi yang cukup strategis bagi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya serta ikut mendorong para kemitraan global lainnya untuk bersama sama memperjuangkan kepentingan negara berkembang lainnya. Sebagai Negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan yang relatif stabil, Indonesia dapat menjadi acuan sekaligus perwakilan bagi negara berkembang lainnya. Posisi Indonesia sebagai negara presidensi dalam forum G20 2022 juga merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan Indonesia dalam hal pengembangan transformasi ekonomi, dengan harapan untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian nasional Indonesia

**Kata Kunci : Covid 19, Diplomasi Multilateral, Indonesia, Kepentingan Nasional, Presidensi G20**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu anggota G20 yang menandakan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kategori kemampuan ekonomi yang baik. G20 merupakan perkumpulan negara-negara di dunia dari berbagai lintas benua yang diukur dari tingkat pendapat devisa negara atau PDB. Terpilihnya Indonesia menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022 merupakan harapan besar bagi Indonesia untuk bisa bangkit dari ke tidak stabilan ekonomi pasca serangan Covid-19 sejak tahun 2019-2021. Serangan Covid-19 ini membuat stabilitas ekonomi negara-negara di dunia menjadi tidak stabil termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Hadirnya pertemuan G20 di Indonesia bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk bisa memanfaatkan pertemuan ini sebagai bagian dari membangun kembali ekonomi yang stabil. Presidensi Indonesia di G20 bisa menjadi langkah konkrit Indonesia untuk memulihkan keadaan ekonomi global yang semakin memburuk karena belum usainya serangan Covid-19.<sup>2</sup> Dengan mengambil tema “*Recover Together, Recover Stronger*” atau “Pulih Bersama dan Kuat Bersama” adalah tema yang tepat untuk bangkit keterpurukan ekonomi global. Artinya tema ini memiliki logika berpikir bahwa masalah kesehatan global

---

<sup>1</sup>Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G., & Tanaga, S. (2011). Peran Indonesia dalam G-20. Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia. Friedrich Ebert Stiftung. Jakarta Selatan

<sup>2</sup>Febrylian, Bentang (2021, 11 8) *Indonesia Terpilih Menjadi Presiden G20 Karena Berhasil Kendalikan Pandemi*. Diakses dari covid19.go.id  
<https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-indonesia-terpilih-menjadi-presiden-g20-karena-berhasil-kendalikan-pandemi>

adalah masalah bersama dan harus diselesaikan secara bersama-sama. Sebab apabila ini tidak dilakukan maka upaya negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 akan sulit tercapai. Hal ini diukur dari PDB negara-negara di dunia yang semakin memburuk karena belum usainya pandemic Covid 19.

Presidensi Indonesia mengangkat tiga bidang kerja sama internasional sebagai strategi pemulihan ekonomi global. Tiga bidang tersebut adalah kerja sama kesehatan global, kerja sama ekonomi digital, dan kerja sama energi global. Tiga bidang ini bisa menjadi dasar pertimbangan rasional negara-negara G20 untuk melakukan kerja sama yang berbasis altruisme global untuk menciptakan ketahanan ekonomi global. Pada bidang kesehatan merupakan penentu bagaimana ekonomi bisa pulih apabila negara tersebut terbebas dari ancaman baik virus yang berakibat endemik atau virus yang berakibat pandemi. Kedua persoalan ini membuat kebijakan kesehatan global menjadi terganggu, implikasinya pun masyarakat global kewalahan untuk melakukan transaksi ekonomi secara wajar. Keterbatasan akses membuat akselerasi pendapatan ekonomi pun menjadi kurang baik.

Pada bidang ekonomi digital adalah tuntutan era modern karena ekonomi digital menandai integrasi teknologi informasi pada bidang ekonom yang membuat polarisasi dan transaksi ekonomi berubah. Teknologi big data, artifisial intelijen, digitalisasi robotik merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital. Komersialisasi ekonomi dengan munculnya teknologi *e-commerce*,

bitcoin, trading di internet menunjukkan perubahan pola transaksi ekonomi. Di sisi lain pada bidang energi menjadi isu krusial dalam ketahanan energi global.

Hal ini ditandai dengan semakin menipisnya sumber daya seperti batu bara, minyak bumi, fosil, dan sebagainya membuat energi harus diarahkan pada transmisi berbasis berkelanjutan dan berbasis lingkungan. Implikasi rasionalnya adalah juga membuat pemanasan global semakin parah dan semakin menambah rumit persoalan global yang semakin kompleks. Presidensi Indonesia di G20 ini menjadi momen terbaik Indonesia untuk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan sejumlah negara-negara besar di dunia untuk menciptakan kerja sama yang inklusif, sustain dan menguntungkan bersama serta berbasis pada *green economy* Artinya Presidensi Indonesia pada G20 ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia pada tiga bidang yakni diplomasi komersial, diplomasi perdagangan dan diplomasi finansial di G20.<sup>3</sup>

Diplomasi komersial diarahkan untuk memperoleh dukungan negara-negara besar terutama hasil produk dalam negeri khususnya produk UMKM yang bisa dikomersilkan dalam pertemuan tersebut. Selain itu, dari adanya produk tersebut bisa dijadikan sebagai media perdagangan global yang berlanjut untuk mendapatkan devisa negara. Dan tidak kalah penting adalah diplomasi finansial yang diarahkan pada bantuan investasi asing untuk membangun sumber-sumber daya ekonomi di era digital.

---

<sup>3</sup>Kemenkeu (2020). Apa itu G20 dan Manfaatnya untuk Indonesia. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-0-dan-manfaatnya-untuk-Indonesia.html>

Kerja sama internasional pada presidensi Indonesia juga membuka peluang besar serta tantangan bagi pemerintah daerah atau *paradiplomacy* untuk bisa ikut meramaikan pertemuan multilateral tersebut. Artinya sejumlah daerah bisa memanfaatkan pertemuan ini untuk melakukan kerja sama multi level. Bentuknya adalah bisa antar representasi pemerintah daerah atau bisa melalui fasilitasi oleh negara-negara untuk membangun di daerah.<sup>4</sup> Yang paling berpeluang besar memanfaatkan presidensi ini adalah daerah yang menjadi tuan rumah yakni Provinsi Bali. Walaupun tidak menutup kemungkinan lain bagi pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.

Artinya pola kerja sama ini adalah *multi level government* yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan donor ekonomi berupa masuknya investasi asing di daerah. Situasi ini sesuatu yang pasti sebab setiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang berbeda dan keunikan masing-masing dalam berbagai bidang. Dan melalui pertemuan G20 Indonesia ini bisa menjadi kesempatan yang tepat buat pemerintah daerah untuk bisa difasilitasi oleh negara bisa membentuk kerja sama multi level. Presidensi Indonesia dalam G20 adalah kesempatan terbaik untuk pemerintah daerah atau *paradiplomacy* untuk membuka peluang investasi.

Pola kerja sama ini bisa menjadi era baru keterlibatan daerah dalam diplomasi multilateral di tingkat global dan akan menjadi bukti kualitas daerah dalam melakukan diplomasi. Mengapa ini penting sebab pemerintah daerah di

---

<sup>4</sup>Triadha, Achmad Fauzan (2022, 8 15). *7 Manfaat sebagai Presidensi G20 bagi Indonesia dan Dunia*. Diakses dari <https://iap2.or.id/7-manfaat-sebagai-presidensi-g20-bagi-Indonesia-dan-dunia/>

Indonesia telah dibekali sejumlah aturan prosedur dan teknis untuk bisa bekerja sama dengan pihak asing. Misalnya UU/23/2014, UU/24/2000/ UU/37/1999, PP. 28/2018, Permendagri No.25/2020 dan Permenlu No. 3 tahun 2019.

Oleh sebab itulah Presidensi Indonesia pada pertemuan G20 di Bali akan menjadi sesuatu yang baik untuk menciptakan *citybranding*, *nation branding* dan *people branding* untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk memulihkan ekonomi nasional dan global. Artinya secara khusus bahwa kesempatan ini bisa menjadi peluang juga bisa menjadi tantangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau *paradiplomacy* untuk menarik masuknya investasi asing. Berdasarkan uraian diatasmaka penulis mengangkat judul“**Analisis Diplomasi Indonesia dalam Meraih Presidensi G20 2022**”.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan berfokus pada “ *Analisis Diplomasi Indonesia dalam meraih Presidensi G20 2022*” yang akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam meraih Presidensi G20, dimulai sejak resmi menjadi anggota G20 pada tahun 1999 hingga resmi menjabat sebagai negara presidensi G20 selama 1 tahun dimulai sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, serta kepentingan apa saja yang dilakukan Indonesia selama menjabat sebagai presidensi pada KTT G20 2022.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Diplomasi Indonesia dalam meraih Presidensi G20 2022 ?
2. Apa kepentingan Indonesia dalam meraih Presidensi G20 2022 ?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Diplomasi Indonesia dalam meraih Presidensi G20 2022
2. Untuk menganalisis kepentingan Indonesia dalam meraih Presidensi G20 2022

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

##### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsi akademis dalam studi hubungan internasional khususnya pada tema analisis diplomasi Indonesia dalam penyusunan dan penetapan presidensi G20. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan studi hubungan internasional sehingga menginsprasi peneliti lainnya untuk meneliti lebih jauh.

##### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan analisis diplomasi dalam penyusunan dan penetapan presidensi G20.

2. Penelitian ini bisa menjadi sumber informasi maupun referensi bagi mahasiswa hubungan internasional sekaligus dapat menjadi bahan bagi pemerintah ataupun para pengambil kebijakan.
3. Penelitian ini juga menjadi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara objektif dan subjektif mengenai sebuah peristiwa ataupun fenomena dengan menghadirkan data yang bernilai fakta yang dimana nantinya menghasilkan kesimpulan yang bersifat mendetail mengenai sebuah isu, peristiwa ataupun fenomena yang teliti. Dalam tulisan ini, penulis berupaya untuk menggambarkan terkait “Analisis Diplomasi Indonesia dalam Meraih Presidensi G20 2022”.

### **1.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, maka data yang penulis peroleh Pada penelitian ini, penulis menggunakan melalui *library research* dan *internet research*. Dengan menggunakan data sekunder sebagai referensi utama dalam menyelesaikan penelitian. Adapun data-data sekunder didapatkan sumber relevan dengan judul penelitian seperti dari skripsi, jurnal, artikel, buku-buku serta sumber lainnya.

### **1.4.3 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang sebelumnya telah dipublikasikan atau berasal dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya dengan menggunakan metode kajian pustaka.

### **1.4.4 Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, data dikelompokkan. Setelah itu, data dianalisis secara kualitatif, yang memerlukan menggambarkan keseluruhan dan kebenaran hasil penelitian untuk memfasilitasi ketersediaan deskripsi yang mencakup sejumlah besar fenomena. Kualitatif memberikan pemahaman substansi akan suatu peristiwa, sehingga jenis analisis data ini untuk mendapatkan gambaran ataupun penjelasan yang lebih dalam detail dan lebih jelas.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1.5.1 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2022 hingga bulan September 2023.

### **1.5.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di dua perpustakaan yang berbeda yakni Perpustakaan Universitas Sulawesi Barat dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sulawesi Barat. Selain itu juga mengakses data dari situs website sebagai data pendukung.

## **1.6 Sistematika Penyusunan Skripsi**

Bab I: Pada bagian ini akan berisi mengenai latar belakang, batasan serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penyusunan skripsi.

Bab II : Pada bagian ini akan berisi mengenai telaah konseptual dan telaah pustaka. Dimana penulis menggunakan dua konsep utama untuk mendukung analisisnya.

Bab III : Pada bagian ini akan berisi tentang data-data yang dianggap penting untuk dijadikan bahan analisis, yaitu uraian tentang analisis diplomasi Indonesia dalam meraih presidensi G20 2022.

Bab IV: Berisi tentang analisis detail data berdasarkan teori dan konsep yang dipilih.

Bab V: Dalam bab terakhir akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK DAN TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teoritik

##### 2.1.1 Diplomasi Multilateral (*Multilateral Diplomacy*)

Seni atau praktik negosiasi oleh seseorang yang biasanya mewakili suatu bangsa atau organisasi dikenal sebagai diplomasi. Istilah "diplomasi" sering dikaitkan dengan "diplomasi internasional," yang biasanya berkaitan dengan berbagai masalah, termasuk perdagangan, ekonomi, dan budaya. Diplomasi bilateral, yang biasanya melibatkan misi dari kedutaan atau kunjungan kenegaraan antara dua pihak, adalah bentuk diplomasi yang paling sederhana dan tertua. Dapat dikatakan bahwa diplomasi memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari negara dan merupakan sarana utama untuk menyelesaikan masalah internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia.<sup>5</sup>

Diplomasi sendiri berasal dari kata Yunani "*diploun*" yang berarti "menutupi." Selama Kekaisaran Romawi, ini menyebabkan fenomena di mana semua paspor dan kertas jalan dicetak pada bal logam ganda yang dilipat dan kemudian dijahit bersama. Istilah "*diplomas*" datang untuk merujuk pada surat bagian logam ini..<sup>6</sup>

Diplomasi multilateral Westphalian, juga dikenal sebagai diplomasi multilateral, adalah jenis diplomasi yang bertujuan untuk mencapai kebebasan suatu negara. Diplomasi multilateral, berbeda dengan diplomasi bilateral,

---

<sup>5</sup>Setiawan, A. (2016). *Diktat Teori dan Praktik Diplomasi*. Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 1

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 2

menekankan pada kerja sama internasional melalui lembaga-lembaga internasional seperti Konferensi Internasional, Organisasi Non-Pemerintah Internasional (LSM), dan Pertemuan KTT. Seorang diplomat harus dapat bekerja dalam batas-batas kerangka kerja yang telah dibatasi dalam diplomasi multilateral dan harus bias untuk memperluas hubungan baik dengan negara lain. Gagasan diplomasi multilateral telah digunakan oleh banyak negara sejak lama dalam diplomasi kontemporer. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan NATO semuanya diatur oleh konsep diplomasi multilateral, yang telah berkembang menjadi sebuah institusi.<sup>7</sup>

Sebagai sebuah solusi bagi negara-negara untuk bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama, diplomasi multilateral muncul. Jenis diplomasi multilateral ini bukanlah hal baru, tetapi dimulai sekitar pergantian abad ke-19. Sebagai hasil dari konflik yang meningkat yang sama, Liga Bangsa-Bangsa didirikan pada awal abad ke-20, menandai upaya untuk menghidupkan kembali diplomasi multilateral. Namun, negara-negara ini tidak hanya gagal mencapai kesepakatan, tetapi masing-masing anggotanya mengundurkan diri karena alasan pragmatis.<sup>8</sup>

Menjadi salah satu contoh diplomasi multilateral terbaik di PBB, meskipun lahir pada 1945. Pada saat itu, bangsa-bangsa di dunia mampu mencapai konsensus mengenai pembentukan organisasi internasional dengan tujuan menjaga perdamaian dunia. Kompleksitas hubungan internasional

---

<sup>7</sup> Kompasiana, (2015, 6 26). *Multilateral Diplomacy*. Diakses dari Kompasiana.com <https://www.kompasiana.com/mrasyaaditya/550069a7a333115b745109fa/multilateral-diplomacy>

<sup>8</sup>Hanzel, Matthew (2011, 12 20) *Simun 2: Diplomasi Multilateral*. Diakses dari <https://matthewhanzel.com/2011/12/20/simun-2-diplomasi-multilateral/>

menyebabkan formalisasi diplomasi (diplomasi multilateral) pada abad ke-20, yang tidak hanya mencakup hubungan politik dan keamanan tetapi juga bidang lain seperti sosial budaya dan ekonomi lingkungan. Ditandai dengan kemunculan majelis umum PBB sebagai parlemen global sejati. Politik dimulai sebagai cara untuk membuat orang bersemangat di forum internasional, yang kemudian berkembang menjadi forum bersama yang besar untuk menyelesaikan masalah non-politik.<sup>9</sup>

Dengan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dunia dan cara-cara di mana mereka dapat dihubungkan bersama, peran diplomasi multilateral di abad ke-21 menjadi semakin kompleks. Untuk menggambarkan kompleksitas tersebut, rasanya tidak cukup seperti menggambarkan sebuah sarang laba-laba. Sehingga, para diplomat harus berperan dalam mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas tentang situasi global.<sup>10</sup>

Jika dilihat melalui lensa dua mazhab penting dalam Studi Hubungan Internasional, mazhab realis berpendapat bahwa diplomat harus segera membela kepentingan negara mereka sendiri. Hal ini membuat tindakan diplomasi multilateral semakin luar biasa. Mazhab liberal, di sisi lain, menekankan dan menuntut diplomat untuk membina hubungan internasional yang positif. Melakukan dua hal yang berlawanan ini secara bersamaan adalah salah satu tantangan bagi para diplomat, terlepas dari kenyataan bahwa ini dianggap tidak terlalu teoritis.

---

<sup>9</sup>*Ibid*  
<sup>10</sup>*Ibid,*

Diplomasi multilateral berkembang setelah peran dunia kedua dengan ekspansi besarr-besaran di sejumlah negara dan keyakinan baru bahwa diplomasi konferensi dalam sistem PBB berdasarkan suara mayoritas adalah peluang terbaik mereka untuk mendapatkan pengaruh. Namun, kekuatan besar barat menjadi lelah membayar untuk program-program yang ,mereka keberatan secara politik, dan secara bertahap melalui ‘pengambilan keputusan konsensus’ mulai membuat beban mereka terasa sekali lagi. Pada 1980-an, dengan sistem PBB terhuyung-huyung dibawah pengaruh pemotongan anggaran Amerika dan negara-negara miskin kecewa, multilateralisme mengalami krisis. Akibatnya, seperti yang dikeluhkan oleh diplomat senior Singapura, Kishore Mahbubani, baru-baru ini, ‘semakin sedikit negara yang mengirim diplomat terbaiknya ke diplomasi multilateral’. Tetapi multilateralisme akan tetap ada.<sup>11</sup>

Diplomasi multilateral dikenal sebagai sarana untuk pemecahan masalah dan juga untuk lebih jauh kerja sama internasional dan pembangunan perdamaian melayani berbagai fungsi. Ini berfungsi sebagai forum untuk perwakilan negara, serta platform pengambilan keputusan. Selanjutnya multilateral diplomasi juga menetapkan tujuan aspirasi untuk kemanusiaan dan penciptaan norma. Itu juga memperkuat hukum internasional sehubungan dengan KTT G20. Fungsi utama multilateral diplomasi terletak pada perannya sebagai platform tempat para wakil negara bertemu dan berdiskusi masalah ekonomi. saat KTT G20 dilaksanakan, perwakilan negara anggota berkesempatan untuk melakukan peningkatan jumlah negosiasi yang

---

<sup>11</sup>Berridge, G. R. (2022). *“Theory and Practice : Multilateral Diplomacy”* diakses dari [https://asef.org/wp-content/uploads/2020/10/ModelASEM\\_Diplo\\_MultilateralDiplomacy.pdf](https://asef.org/wp-content/uploads/2020/10/ModelASEM_Diplo_MultilateralDiplomacy.pdf)

memungkinkan KTT memiliki hal yang sama pemahaman dan menghasilkan revolusi. Untuk mengeluarkan revolusi harus dilakukan DMP. Negosiasi dan tindakan diplomasi yang dilakukan sangat penting karena dijamin pasti gerak mendukung. Dengan begitu, DMP bisa terjadi dalam waktu singkat. Namun, sebagai konferensi tidak hanya terdiri dari dua negara, proses DMP terkadang memakan waktu yang lama. Meskipun itu memakan waktu yang, konferensi adalah cara baik untuk memastikan kepentingan masing-masing anggota cenderung, seperti setiap perwakilan dipandang sama satu sama lain.<sup>12</sup>

Diplomasi multilateral juga berfungsi sebagai mediator yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan konferensi multilateral sebagai dasar untuk melalui diplomasi bilateral guna membahas masalah-masalah mendasar yang sudah berdiskusi di tempat lain diluar ruang konferensi. Selaintu sebuah pertemuan puncak juga bisa menjadi tempat dimana negara memiliki peluang untuk memperluas hubungan mereka negara sebagian lain. Selain itu, juga bisa membuka peluang baru untuk kerja sama sebagai kerja sama antar negara. Kesimpulannya, diplomasi multilateral dilakukan sebagai forum perwakilan kerja sama, mencari solusi pemecahan masalah dan menjalin kerja sama internasional melalui diplomasi multilateral, resolusi dilihat sebagai solusi yang sudah tercapai kesepakatan bersama antar negara.<sup>13</sup>

Pertemuan-pertemuan multilateral dilakukan dalam berbagai bentuk dan tingkatan yang berbeda, karena membuat subjek pertemuan-pertemuan

---

<sup>12</sup>Syahrazi, Putri R & Valencia (2020), " Multilateral Diplomacy And Its Reflection In G20" diakses dari [https://www.academia.edu/43132036/MULTILATERAL\\_DIPLOMACY\\_AND\\_ITS\\_REFLECTI\\_ON\\_IN\\_G20](https://www.academia.edu/43132036/MULTILATERAL_DIPLOMACY_AND_ITS_REFLECTI_ON_IN_G20)

<sup>13</sup>*ibid*, hlm 4

multilateral sulit untuk diukur. Namun, sejak pembentukan perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Bretton Woods Institutions (BWI)* pada tahun 1945, pertemuan dan pertemuan multilateral telah meledak bahkan lebih sering digunakan ketika dunia sedang menghadapi masalah global tanpa batas. Bentuk pertemuan multilateral dapat berupa dibedakan menjadi empat kategori yaitu; pertemuan multilateral universal, pertemuan multilateral fungsional/khusus, pertemuan multilateral regional dan, *ad hoc*.<sup>14</sup>

Penciptaan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meningkatkan jumlah pertemuan universal dan konferensi, di entuk dalam bentuk atau diskusi formal seperti forum dan konferensi, hal ini disebabkan oleh munculnya tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti meningkatnya ekstremisme kekerasan dan hambatan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) seperti kemiskinan ekstrem, gender dan ketimpangan ekonomi, pengungsi dan perubahan iklim. Pertemuan dan koferensi universal diadakan sebagai pendekatan holistic dan terintegrasi untuk mengatasi masalah global, ia mengumpulkan para pemimpin dari sebagai negara di seluruh dunia kesuatu tempat dan mewakili seluruh ummat manusia untuk membuat langkah ‘ideal’ menuju dunia yang berkelanjutan, aman dan damai. Pertemuan universal ini memiliki tumbuh dari pertemuan rutin tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menjadi sekarang termasuk semua jenis konferensi global. Ada tumbuh pesimisme menuju universal pertemuan dan konferensi karena berbagai perbedaan yang dihadapi para pemimpin ketika mereka hadir

---

<sup>14</sup>*Ibid*,

konferensi seperti perbedaan minat, masalah dan latar belakang budaya, untuk beberapa perbedaan membuat pertemuan dan konferensi universal menjadi ukuran efektif, meskipun untuk menyimpulkan multilateralisme dan penerapannya pada dasarnya kompleks.<sup>15</sup>

PBB telah membuat berbagai badan kasus dengan mereka sendiri konferensi tahunan antar pemerintah dan dewan pemerintahan untuk memberikan arahan dan pedoman tentang dasar-dasar keputusan yang dicapai melalui diplomasi multilateral. Sebuah khusus konferensi dan pertemuan multilateral diadakan secara khusus membahas masalah tertentu. Adalah forum untuk menghambat kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan kepemimpinan dan tata kelola global yang baik dibidangnya masing-masing. Sama seperti konferensi universal, konferensi fungsional/khusus dibuat untuk mengatasi masalah umum-global yang dihadapi oleh komunitas global, para pemimpin dari seluruh dunia dan dapat berkumpul untuk membahas isu-isu penting dan memutuskan tindakan yang mungkin ideal untuk mengatasi masalah ini, hal ini terlihat pada reaksi bangsa terhadap pandemi yang tidak menghormati batas-batas negara, penting untuk mengamati bagaimana diplomasi multilateral bekerja organisasi khusus seperti Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) untuk memahami caranya umat manusia dapat berkumpul dan bekerja sama dalam konferensi.<sup>16</sup>

Diplomasi multilateral berkembang pesat di tingkat regional yang paling sukses contoh diplomasi multilateral adalah kerja sama antar negara yang

---

<sup>15</sup> Ibid,

<sup>16</sup> Ibid, hlm 6

diberikan oleh Eropa Serikat (UE). Uni Eropa berhasil mencapai kerja sama ekonomi antar negara anggota UE untuk memudahkan proses perdagangan, berhasil membuka perbatasan untuk memudahkan perjalanan warga, karena keberhasilan ini, Uni Eropa telah menjadi contoh emas untuk kerja sama multilateral regional, sayangnya, tidak ada kerja sama regional yang mendekati apa yang telah dicapai oleh Uni Eropa. Keberhasilan diplomasi multilateral juga mendorong terciptanya diplomasi *ad hoc* pertemuan, salah satu grub *ad hoc* paling sukses saat ini adalah G20 yang menyelamatkan dunia dari krisis ekonomi pada tahun 2009. Berbeda dengan perkelompokan universal yang mapan seperti Amerika Serikat Bangsa dan pengelompokan regional seperti Uni Eropa, G20 tidak memiliki markas atau aturan prosedur yang membuat G20 benar-benar *ad hoc*. Bentuk diplomasi multilateral *ad hoc* muncul dalam berbagai tingkat legitimasi dan keberhasilan. Inisiatif melawan ranjau darat dan bom cluster misalnya, menemukan momentum internasional yang signifikan dan dilegitimasi ketika disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) oposisi dilemparkan oleh Amerika Serikat, Rusia dan Cina.<sup>17</sup>

Diplomasi multilateral menurut definisinya, dinaungi oleh unsur budaya, dimana tantangan yang dihadapi diplomat zaman modern sebagai keragaman budaya di wakili dalam pengaturan multilateral menghadirkan banyak masalah. Dalam pengaturan multilateral, masalah yang dicapai, Rosenthal menulis tentang pentingnya memperhitungkan dimensi budaya diplomasi. Diplomasi multilateral seringkali memerlukan kesepakatan dengan beberapa perwakilan

---

<sup>17</sup> Ibid,

budaya yang berbeda, sehingga menghadapi tantangan unik tentang bagaimana diplomat harus berurusan dengan yang lain perwakilan yang semua dapat melakukan urusan mereka dengan cara yang berbeda, mungkin sesuai dengan mereka konteks budaya yang membentuk perilaku mereka.<sup>18</sup>

Tantangan kedua yang juga dihadapi kegiatan diplomasi multilateral saat ini adalah kenyataan bahwa kepentingan internasional anggota kolektif terkadang dikesampingkan oleh kepentingan nasional. Hal ini disebabkan karena kepentingan terbaik setiap negara adalah kepentingan nasionalnya yang membuat prioritas yang harus dikejar oleh negara, alih-alih berkompromi atau membuat konsesi mereka, demi mencapai kepentingan dan kesepakatan yang diterima oleh negara-negara lain. Dengan halnya, DK PBB ketika Amerika Serikat sebagai anggota P5 mengutamakan kepentingan nasionalnya dan mengutamakan kepentingan internasional. Misalnya pemerintah Clinton memblokir respon efektif untuk mencegah genosida di Rwanda dengan menolak menggunakan kata tersebut 'genosida' dalam resolusi DK PBB. Demikian pula, ini juga terjadi di pemerintahan Bush yang mendistorsi peran DK PBB ketika menggunakan kekuatan unipolarnya untuk membuat DK PBB melampaui batas perannya yang sah dan ikut campur dalam keputusan yudisialnya dengan memberikan kekebalan kepada pasukan Amerika dari ICC untuk kepentingannya sendiri.<sup>19</sup>

Tantangan ketiga adalah adanya pergeseran tatanan geopolitik multilateral status, sejauh ini kita tahu bahwa dalam tatanan multilateral saat ini, konsep,

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 7

<sup>19</sup>*Ibid*,

nilai, dan norma terutama berasal dari barat itu menentukan apa definisi sah atau tidak sah perilaku internasional. Yang terjadi sekarang adalah pergeseran geopolitik ini status, sekaran kekuatan bergeser dari barat ke Asia (Kebanyakan Cina dan India), menandai berakhirnya dominasi barat. Ini juga akan mempengaruhi cara kerja multilateralisme, dan diplomasi multilateral juga perlu beradaptasi dengan perubahan besar di dunia internasional atau tatanan multilateral. Beberapa tantangan lainnya juga hadir dalam tatanan multilateralisme sepanjang pengalaman pengambilan keputusan di PBB adalah memperluas keanggotaan organisasi yang membuat pembangunan konsensus semakin rumit, peluasan agenda internasional yang telah menyebabkan proliferasi, revolusi dan ketegangan antara kontinuitas dan perubahan dalam proses pengambilan keputusan. Diplomasi multilateral yang menjelaskan mengapa revolusi terlihat ringan dalam substansi sejauh menyangkut tindakan nyata dan memperluas keanggotaan “*pecking order*” yang berbeda diantara anggota yang berpengaruh pada tingkat “*leverage*” selama negosiasi multilateral.<sup>20</sup>

### **2.1.2 Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Inti dari hubungan internasional adalah interaksi, dan setiap interaksi memiliki alasan yang menjadi kepentingan bersama. Dimana negara merupakan pemain utama dalam hubungan internasional dan ingin bekerja sama dengan negara lain dalam Hubungan Internasional. Namun, menjaga hubungan internasional dengan negara lain mutlak diperlukan karena sejumlah alasan,

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 8

termasuk untuk mencapai kekuatan nasional (*National Power*) dan kepentingan nasional (*National Interest*).

Loke Glanville berpendapat bahwa substansi kepentingan nasional harus menjadi fakta objektif dari perbedaan semangat. Sesuatu yang sering dianggap sebagai tujuan awal dari kebijakan luar negeri itu sendiri. Upaya untuk mencapai kepentingan nasional, harus dianggap sebagai standar dan keputusan kebijakan luar negeri. Tidak ada definisi yang mapan tentang kepentingan nasional, dan itu bukan kepentingan yang berbeda dalam konteks internasional yang berbeda dari aspirasi dan masalah domestik. Makna mendasar dari konsep kepentingan nasional adalah bahwa ia mengacu pada tujuan kesejahteraan internasional pemerintah nasional, seperti menjaga kemerdekaan politik dan integritas teritorial.

Kepentingan nasional dapat dijelaskan oleh dua faktor. Pertama, yaitu "kepentingan nasional," yang dapat dianggap sebagai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Gagasan bahwa masyarakat hanyalah kerangka kerja yang lebih kecil yang membentuk data politik nyata ditolak demi kepentingan nasional, yang memandang masyarakat nasional sebagai komunitas. Kedua, prinsip regulatif diplomasi yang dikenal sebagai "kepentingan nasional" mengungkapkan kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan warga negara lain sebagai tujuan tindakan diplomatik.

Rasionalitas dan moralitas merupakan dua pertimbangan dan tindakan yang harus dilakukan untuk melayani kepentingan nasional. Perilaku yang konsisten dengan target yang ditetapkan dalam konteks tertentu disebut sebagai "rasional." Nuechterlein menegaskan bahwa ada empat motivasi mendasar bagi

suatu negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan bangsa dan penduduknya dari ancaman kekerasan fisik dari negara lain.<sup>21</sup> Kedua, kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Negara dengan membangun hubungan atau bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah diluar kepentingan tatanan dunia, dimana kepentingan berjuang untuk mempertahankan politik internasional dan sistem ekonomi di mana negara-bangsa merasa aman dan penduduk dapat hidup damai di luar negara nya. Kepentingan keempat adalah ideologi, dimana kepentingan terbaik negara untuk menjaga nilai-nilai ideologis negara dari ancaman ideologis terhadap kepentingan nasional mereka.

Diplomasi di negara Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo, yang telah menunjukkan beberapa implementasi diplomatik yang signifikan baik secara bilateral maupun multilateral, menjadi pokok bahasan dari dua pasal terakhir, yaitu tentang diplomasi sebagai sarana memajukan kepentingan nasional tanpa menggunakan kekerasan. Selain diplomasi kemanusiaan yang dimulai oleh pemerintah Indonesia, diplomasi maritim dilakukan secara multilateral di bawah kepemimpinan pemerintah Indonesia. Dimana Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Iqbal Ramadhan membahas kepentingan nasional dalam Hubungan Internasional dalam bentuk program dalam artikelnya yang berjudul *China's Belt*

---

<sup>21</sup>Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109-115.

*Road Initiative: Considering Traditional Geopolitical Theory*. Didalam artikel ini, *McKinder's Theory* (juga dikenal sebagai *Heartland Theory*) dan *Mahan's Theory* masih dianggap cukup relevan untuk membahas program pemerintah China, yang dikenal sebagai *China Belt Road Initiative* (BRI). Program ini mengkaji keinginan China untuk membangun dua rute perdagangan berbasis darat dan laut. Kedua rute perdagangan internasional ini akan membutuhkan kolaborasi dengan sekitar 65 negara di kawasan Asia, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah. Akibatnya, Presiden Xi Jinping telah berulang kali berusaha membujuk negara-negara tentang saling menguntungkan dari dua rute perdagangan yang diusulkan. Pemerintah Cina mengeluarkan sejumlah besar uang untuk diinvestasikan dalam bentuk bantuan asing kepada negara-negara Asia strategis, seperti: India, Pakistan, Indonesia, dan sejumlah negara Asia Tengah, yang semuanya membutuhkannya untuk pembangunan koridor untuk dua jalur di wilayah mereka.<sup>22</sup>

Konsep kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sebuah kerangka kerja yang menjelaskan bahwa negara memainkan peran yang sangat penting dalam dunia internasional. Thomas Hobbes berpendapat bahwa suatu wilayah dan populasi didalamnya harus dilindungi oleh negara dikarenakan negara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup warganya. Kepentingan nasional sendiri lahir dari adanya kebutuhan negara baik itu dari situasi internal negara baik dari sisi politik, ekonomi, militer dan sosial budaya. Kepentingan nasional dimaknai juga sebagai suatu kekuatan untuk dapat memberikan dampak

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm 111

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan kearah untuk mendapat pengakuan dari pandangan global manapun.<sup>23</sup>

Morgenthau berpendapat, bahwa yang menjadi gagasan utama dari konsep kepentingan ini meliputi dua faktor, yakni rasionalitas dan kebutuhan. Dalam era global saat ini, sebuah keberlangsungan hidup merupakan sebuah elemen penting dan harus didapatkan bagi sebuah negara, maka dari itu negara-negara saling berlomba-lomba dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kekuasaan. Konsep kepentingan nasional juga dimaknai sebagai perlindungan identitas politik serta budaya dan inilah langkah yang ditempuh oleh sebuah negara untuk mencapai apa yang diinginkan oleh suatu negara. Hal inilah yang menjadikan konsep kepentingan nasional tetap dijadikan sebagai alasan oleh negara untuk bisa tetap terlibat dengan negara-negara lain untuk menjalin kerja sama.<sup>24</sup>

Dalam pemenuhan kepentingan nasional pada suatu negara, berbagai macam strategi dilakukan oleh setiap negara untuk pemenuhan kebutuhannya untuk memaksimalkan kesejahteraan rakyatnya, hal tersebut dikarenakan sebuah negara tidak dapat mengandalkan sumber dayanya sendiri dan memerlukan bantuan dari pihak lain.<sup>25</sup> Dalam sebuah kepentingan nasional didasari oleh kepentingan ekonomi, pertahanan, ideologi dan tatanan dunia. Kepentingan

---

<sup>23</sup> Bahtiar,W.A. (2019). *Kepentingan Nasional Jepang Dalam The Unites Nations FrameworkConvention On Climate Change : Skema Joint Crediting Mechanism Tahun 2012-2015*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta., hlm.15.

<sup>24</sup>Putra,R.M.(2020). *Analisis Kepentingan Nasional Jepang dalam Kerja sama Energi Nuklir dengan India Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta,hlm.14.

<sup>25</sup>Avivi,Y & Siagian,M (2020). *Kepentingan Indonesia Dalam Kerja sama Bilateral dengan Jepang Studi Kasus : Indonesia-Japan Economic Parnertship Agreement (Ijepa)*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.3 No.1 (2020)*, hlm.50.

ekonomi sendiri, didasari oleh sebuah pencapaian kesejahteraan antar negara. Pertahanan, dilihat dari adanya perlindungan terhadap warga sipil dan negara-negara yang mengancam. Ideologi sendiri lebih menekankan pada perlindungan nilai-nilai yang beredar di masyarakat dan sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dalam pandangan umum sehingga dibutuhkan adanya sebuah perlindungan. Sedangkan tatanan dunia merupakan suatu cara penjagaan sistem politik dan ekonomi internasional bagi suatu negara agar merasa aman dan interaksi yang terjalin antar warga negara bisa tertular dan berjalan dengan lancar.<sup>26</sup>

Kepentingan nasional memiliki tiga dimensi, dimana ketiga dimensi ini terbagi menjadi tiga kepentingan yang mendasar bagi sebuah negara. Ketiga kepentingan tersebut antara lain :<sup>27</sup>

**Kepentingan Politik**, yang mana dalam hal ini dijelaskan bahwa dalam mempertahankan eksistensi negara dan pandangan politik dari pengaruh politik negara lain, maka negara akan tetap mencoba mempertahankan dan menjaganya.

**Kepentingan Ekonomi**, dalam hal ini menjelaskan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan negaranya maka sebuah negara membutuhkan sebuah kegiatan ekonomi yang bekerja sama dengan negara lain.

**Kepentingan Keamanan**, dalam hal ini menjelaskan bahwa agar tetap terjaga perdamaian dan keamanan maka sangat diperlukan untuk tetap menjaga sebuah stabilitas baik itu dalam lingkup negara, regional, maupun internasional.

---

<sup>26</sup>*Loc Cit*, Putra R.M (2020), hlm 15

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 16-17

Bukan hanya dimensi saja, Donald E. Nuerterlein membagi kepentingan nasional menjadi beberapa elemen, yakni :<sup>28</sup>

**Kepentingan Pertahanan Negara**, dalam rangka melindungi rakyat dari berbagai ancaman baik itu berupa ancaman fisik maka di perlukan terhadap suatu sistem yang dianut di masing-masing negara. **Kepentingan Tata Dunia**, dalam sebuah negara diperlukannya sebuah pemeliharaan pada sistem politik dan ekonomi internasional yang ada, sehingga rakyat dan badan usaha didalamnya lebih merasa aman dan terhindar dari gangguan dari apapun. **Kepentingan Ekonomi**, merupakan sebuah hubungan antar negara seperti halnya hubungan ekonomi diperlukan adanya tambahan nilai secara langsung. **Kepentingan Ideologi**, merupakan sebuah hubungan antar negara di perlakukannya sebuah perlindungan yang mana didalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat dilihat dan dipercaya oleh masyarakat dari sebuah negara.

## 2.2 Telaah Pustaka

Untuk mendukung penulisan karya ilmiah ini, penulis kemudian mencari data relevan melalui beberapa tinjauan pustaka berikut untuk mendukung dalam penyusunan penelitian ini.

Pertama, merupakan jurnal dari Sinta Julina (2022) yang berjudul “**Komunikasi Indonesia Sebagai Presidensi G-20 Indonesia 2022 di tinjau dari Perspektif Diplomatik**” Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan, dari sudut pandang diplomatik, bentuk-bentuk komunikasi

---

<sup>28</sup> Alfajri, S.I (2017). Kepentingan Indonesia Mengekspor Ikan Tuna ke Amerika Serikat Tahun 2012-2015. *JOM FISIP Vol.4 No.2 Oktober 2017, hlm 3.*

internasional Indonesia selama Presidensi G-20 Indonesia. Penelitian ini mendukung analisisnya dengan teknik analisis data kualitatif.

Studi ini menunjukkan bahwa komunikasi internasional Indonesia selama Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dilihat dari perspektif diplomasi, khususnya diplomasi *multi-track* melalui pertemuan ditingkat KTT dengan kepala negara dan pemerintah, kementerian keuangan dan luar negeri, gubernur bank, pusat dan deputy keuangan, kelompok kerja (*Sherpa Track* and *Financial Track*), dan serta 8 kelompok keterlibatan.

Kedua, merupakan jurnal dari Laode Muhammad Fathun (2022) yang berjudul **“Peran *Paradiplomacy* dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20 ”** Universitas Pembangunan “ Veteran “ Nasional Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran *paradiplomacy* dalam mem anfaatkan presidensi Indonesia di G20 dengan menggunakan studi kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini berpendapat bahwa peran *pa radiplomacy* DKI Jakarta melalui diplomasi kota berpeluang untuk mendapatkan hasil positif. Hal ini terlihat dari peran Jakarta sebagai aktor dalam diplomasi kota mampu melakukan diplomasi level kota di U20.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa presidensi Indonesia pada G20 merupakan peluang yang sangat besar bagi Indonesia untuk mendapatkan citra positif melalui pendekatan diplomatik. Dengan banyaknya delegasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut membuat Indonesia dapat meraih peluang investasi yang lebih besar. Selain itu, melalui presidensi tersebut, dapat

menciptakan kerja sama yang lebih kolektif antara Negara-negara didunia untuk dapat membangun kembali stabilitas ekonomi mereka yang tidak stabil diakibatkan oleh pandemi Covid 19, dimana secara tidak langsung menjadi ajang pertunjukkan kualitas diplomasi Indonesia.

Ketiga, merupakan jurnal dari Wiwiek Rukmi Dwi Astuti (2020) yang berjudul **“Kerja Sama dalam Pemulihan Ekonomi Global dari Covid 19”** Universitas Pembangunan Veteran Nasional Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja lembaga G20 dalam upaya pemulihan ekonomi global dari Covid-19 menjelaskan istilah "*manage G20*" dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data berbasis web, dan gagasan *model synergetic hub*.

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa respons kolektif menunjukkan kinerja G20 dalam mengelola sistem kerja sama multilateral. Respons dan kesepakatan yang konsisten ditunjukkan oleh G20 mengukur ketepatan langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara G20, koordinasi dan evaluasi perbedaan kapasitas antara masing-masing anggota dilakukan. Kepatuhan oleh negara-negara anggota G20 akan menarik langkah dan perlakuan yang sama dari negara-negara non-anggota G20.

Terakhir, merupakan jurnal dari Agus Sukawiyana, Anak Agung Elik Lestari, dan Ni Luh Indiani (2022) berjudul **"Aktualisasi Ekonomi Indonesia dalam Presidensi Peluang atau Tren Pertumbuhan G20 ? (Studi tentang Analisis Ekonomi)** "Universitas Mahendratta. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah partisipasi ekonomi Indonesia dalam presidensi G20

merupakan peluang pertumbuhan atau hanya tren. Selain itu, dalam rangka mensukseskan Indonesia sebagai ketua umum pada tahun 2023 dan menginvestigasi isu-isu strategis nasional yang mungkin menjadi agenda prioritas di sektor perdagangan Indonesia. Penelitian ini mengkaji keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik ditinjau dari kebijakan, legitimasi, dan tindakan dengan menggunakan metode penelitian analisis kebijakan *dan Public Impact Fundamental*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktualisasi ekonomi Indonesia selama Presidensi G20 merupakan tren atau peluang, tergantung pada perspektif mana yang Anda pilih. Aktualisasi ekonomi Indonesia dalam perdagangan, khususnya e-commerce, merupakan peluang Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2023. Ada tiga tema besar yang bisa dibahas: WTO, UMKM, dan *E-commerce*. Dari segi tren, aktualisasi perekonomian Indonesia dan G20 dapat dikatakan sebagai sebuah tren.

Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa, secara umum para pelaku usaha yang terlibat, baik korporasi besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ingin Indonesia mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang pada Forum Presidensi G20 Indonesia tahun 2023 sehingga tidak perlu membayar tarif yang banyak, yang akan mempersulit pelaku usaha untuk melakukan ekspor ke negara lain.

*Group of Twenty (G20)* merupakan forum utama kerja sama internasional yang awalnya di bentuk untuk menangani krisis moneter pada tahun 1998. Kerja sama ini bertujuan untuk menyarukan pendapat antara negara berkembang dan

negara maju sehingga solusi yang dikeluarkan menguntungkan semua pihak, yang artinya tidak hanya menguntungkan negara-negara maju saja. Forum G20 telah memiliki dua puluh negara yang tergabung di dalamnya yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Brazil, Inggris, Tiongkok, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Turki, Prancis, Rusia, Uni Eropa, India dan Indonesia.<sup>29</sup>

Menurut kementerian perdagangan Indonesia *Group Of Twenty (G20)* dianggap sebagai forum ekonomi yang utama di dunia yang memiliki posisi strategi karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perokonomian dunia. Berbagai pertemuan yang diadakan berfokus pada penyelesaian berbagai tantangan terhadap pertumbuhan perokonomian global, antara lain isu perdagangan, investasi, keuangan, infrastruktur, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, pembangunan, pertanian, teknologi, energi inovasi, serta ekonomi digital (Kementerian perdagangan Republik Indonesia 2020). Posisi G20 semakin menjadi strategis karena pada bulan april 2019, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa kritis ekonomi global sedang terjadi Target peningkatan dan pemerataan ekonomi global ternyata tidak mencapai hasil yang memuaskan. Berdasarkan *IMF's World Economic Outlook*, tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan, pada tahun 2012, peningkatan ekonomi global mencapai 32% sedangkan pada tahun 2013, peningkatan ekonomi global hanya sekitar 29%. Berdasarkan hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa ekonomi global mulai melemah. Hal ini tentu saja menjadi isu yang penting karena melemahnya ekonomi global, maka ekonomi nasional di negara-negara maju atau pun negara-negara berkembang akan mengalami kondisi yang sama.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hal

## **BAB III**

### **INDONESIA DALAM PRESIDENSI G-20**

#### ***3.1 The Group of Twenty (G-20)***

G-20, yang secara resmi disebut sebagai *Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors*, dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis mengumpulkan kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk berbicara tentang masalah ekonomi global yang signifikan. Menteri keuangan Jerman dan Kanada menghadiri pertemuan pertama grup ini di Berlin pada 15-16 Desember 1999.<sup>31</sup>

Forum ekonomi ini pertama kali dibentuk setelah Krisis Keuangan 1998. Forum G-7 berpendapat bahwa pertemuan tersebut tidak efektif jika tidak melibatkan kekuatan ekonomi lain agar keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan kelompok kecil yang mungkin tidak terwakili. Hampir 2/3 penduduk dunia, 80% total perdagangan global, dan hampir 90% PDB global terdiri dari kelompok ini. Dalam hal sistem moneter internasional, G-20 lebih banyak digunakan sebagai forum ekonomi untuk berkonsultasi dan bekerja sama..<sup>32</sup>

Forum tersebut mengadakan pertemuan rutin untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi tentang kebijakan yang mendorong stabilitas keuangan internasional dan mencari solusi untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Forum ini dianggap sebagai tempat diskusi informal karena sifatnya yang konstruktif dan terbuka mendorong para wakil negara untuk

---

<sup>31</sup>Wulandari, P. (2010). G20 dan Krisis Finansial Global. *Jurnal ISIP*, 9(1). Hlm 52

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm 52

berbicara tentang masalah utama yang menjadi perhatian bersama, yaitu stabilitas ekonomi global. Selain itu, G20 mewakili 80% populasi dan ekonomi dunia.

Negara-negara anggota G20 setuju bahwa keadaan keuangan global saat ini sangat penting. disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk, skema kompensasi lembaga keuangan yang mendorong investasi jangka pendek dan pengambilan resiko yang berlebihan secara moneter yang mendorong kondisi *global imbalances*, pengelolaan resiko pasar keuangan yang kurang bertanggung jawab akibat skema kompensasi lembaga keuangan yang mendorong investasi jangka pendek, dan ketidakmampuan otoritas keuangan negara maju untuk menerapkan perlindungan yang diperlukan.<sup>33</sup>

G20 didirikan pada tahun 1999 dari anggota G7 sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengajak negara maju dan berkembang untuk bekerja sama untuk mengatasi masalah penting yang melanda Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Tujuan utama G20 adalah untuk mencapai pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Pada awalnya, G20 berfungsi sebagai pertemuan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, sejak 2008, G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT, dan pada tahun 2010, diskusi tentang sektor pembangunan juga dimulai. Sejak saat itu, jalur keuangan (*Finance Track*) dan jalur Sherpa (*Sherpa Track*) menjadi bagian dari G20. Istilah "Sherpa" berasal dari istilah "pemandu" di Nepal, dan digunakan untuk menggambarkan cara para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT (*Summit*). G20 adalah organisasi multilateral yang melibatkan 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). Lebih dari

---

<sup>33</sup>*Ibid, hlm 53*

60% penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia dimiliki oleh G20. Di antara anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Japan, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa..<sup>34</sup>

Indonesia resmi menjabat presidensi *Grup Twenty* (G20) selama satu tahun penuh pada tahun 2022. Jabatan ini berlangsung dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 pada November 2022. Serah terima Presiden Italia (sebagai presiden G20 2021) kepada Indonesia dilakukan secara langsung di Roma, Italia, pada 31 Oktober 2021. Dana menteri Italia resmi menerima Presiden Joko Widodo sebagai presiden G20. Jokowi menerima Mario Draghi pada sesi penutupan KTT G20 Roma di La Nuvola di Roma, Italia. Tema presidensi G20 Indonesia 2022 adalah "*Recover Together, Recover Stronger*". Indonesia ingin mengajak orang-orang di seluruh dunia untuk bekerja sama dan saling mendukung untuk pulih bersama dan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan. Selama kepresidenan G20 di Indonesia, tiga masalah utama dibahas yakni sistem kesehatan dunia, transformasi ekonomi dan digital serta transisi energi.

*Group of Twenty* (G20) merupakan forum utama kerja sama internasional yang awalnya di bentuk untuk menangani krisis moneter pada tahun 1998. Kerja sama ini bertujuan untuk menyarukan pendapat antara negara berkembang dan negara maju sehingga solusi yang dikeluarkan menguntungkan semua pihak, yang artinya tidak hanya menguntungkan negara-negara maju saja. Forum G20 telah

---

<sup>34</sup>*Ibid, hlm 52*

memiliki dua puluh negara yang tergabung di dalamnya yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Brazil, Inggris, Tiongkok, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Turki, Prancis, Rusia, Uni Eropa, India dan Indonesia.<sup>35</sup>

Menurut kementerian perdagangan Indonesia *Group Of Twenty (G20)* dianggap sebagai forum ekonomi yang utama di dunia yang memiliki posisi strategi karena secara kolektif mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan setidaknya 85% perokonomian dunia. Berbagai pertemuan yang diadakan berfokus pada penyelesaian berbagai tantangan terhadap pertumbuhan perokonomian global, antara lain isu perdagangan, investasi, keuangan, infrastruktur, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, pembangunan, pertanian, teknologi<sup>333</sup>, energi inovasi, serta ekonomi digital (Kementerian perdagangan Republik Indonesia 2020). Posisi G20 semakin menjadi strategis karena pada bulan april 2019, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa kritis ekonomi global sedang terjadi Target peningkatan dan pemerataan ekonomi global ternyata tidak mencapai hasil yang memuaskan. Berdasarkan *IMF's World Economic Outlook*, tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan, pada tahun 2012, peningkatan ekonomi global mencapai 32% sedangkan pada tahun 2013, peningkatan ekonomi global hanya sekitar 29%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi global mulai melemah. Hal ini tentu saja menjadi isu yang penting karena melemahnya ekonomi global, maka ekonomi nasional di

---

<sup>35</sup>Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12-23.

negara-negara maju atau pun negara-negara berkembang akan mengalami kondisi yang sama.<sup>36</sup>

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Bukan hanya berdampak pada kesehatan, pandemi ini juga berpengaruh ke beberapa sektor, mulai dari kondisi ekonomi, pendidikan hingga kehidupan sosial masyarakat. Beberapa dampak perlambatan ekonomi sangat terlihat dan dirasakan pada sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, perhotelan, pariwisata, industri dan juga ritel. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Indonesia dalam memulihkan perekonomian nasional yakni melalui Forum International G-20. Dimana Indonesia resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan Presidensi G20 sejak diserahkan oleh Italia sebagai tuan rumah sebelumnya. Salah satu keuntungan ekonomi yang diperoleh Indonesia dari pelaksanaan KTT G-20 tersebut antara lain, memberikan kontribusi sebesar Rp.7,4 triliun terhadap PDB negara. Selain itu terjadi peningkatan konsumsi domestik hingga mencapai Rp. 1,7 triliun.<sup>37</sup>

Dari sektor pariwisata, KTT G20 akan berkontribusi dalam proyek peningkatan wisman hingga 1,8 -3,6 juta serta 600-700 ribu pekerjaan baru yang didukung oleh kinerja yang baik dari sektor kuliner, fashion hingga kerajinan. Selain itu, karena 80% investor global berasal dari negara-negara G-20, presidensi G20 Indonesia akan mendorong investasi dalam UMKM dalam negeri. Ini adalah momentum yang menunjukkan keberhasilan reformasi struktural, dan karena itu Presidensi G20 akan berperan dalam merancang kebijakan pemulihan ekonomi

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal 13

<sup>37</sup>Suryawijaya, T. W. E., Priono, S. A., & Ingsih, K. (2022). *G20: Vehicle for Indonesia's Economic Recovery* (No. 8cvjp). Center for Open Science.

global. Pemulihan ekonomi global dan domestik akan meningkatkan konsumsi masyarakat, kaninvestasi, dan aktivitas ekspor-impor yang tumbuh pesat, sehingga Indonesia akan menguntungkan jika perekonomian global membaik. Hasilnya adalah peningkatan penerimaan pemerintah pajak lebih dari 18%, penerimaan bea cukai lebih dari 24%, dan penerimaan PNPB lebih dari 23%.

Indonesia telah menjadi anggota langsung G20 sejak awal berdirinya pada tahun 1999. Bahkan, sejak berdirinya G20, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi anggota. Ada kemungkinan bahwa posisi strategis Indonesia didukung oleh pertumbuhan ekonominya yang pesat, yang pada akhirnya akan menjadikan Indonesia presiden G20. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menunjukkan kekuatan Indonesia di tingkat global.<sup>38</sup> Indonesia ditunjuk sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022 dalam pertemuan *Riyadh summit 2020*, dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma pada 30-31 Oktober 2021. Periode Presidensi G20 berlangsung selama satu tahun, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia berkesempatan menjadi satu-satunya Wakil negara ASEAN serta negara-negara berkembang dalam keanggotaan G20. Dilansir dari laman Sekretariat G20 Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perokonomian, dikatakan bahwa berbeda dari kebanyakan forum internasioanal, G20 beroperasi tanpa secretariat atau staf permanen. Ketua G20 dipilih secara bergilir berdasarkan sistem rotasi kawasan dan diganti setiap tahun oleh KTT. Untuk memastikan bahwa pertemuan tahunan G20 berlangsung dengan lancar, organisasi yang dikenal sebagai Troika, yang

---

<sup>38</sup>Nainggolan, H. M., Permatasari, N. I., & Hikmalia, W. (2022). Pentingnya Juru Bicara Sebagai Komunikator Politik Pada Presidensi G20 Indonesia. *JURNAL HERITAGE*, 10(2), 172-187.

terdiri dari presidensi tahun sebelumnya dan presidensi selanjutnya, membantu koordinasi agenda prioritas G20.<sup>39</sup>

Anggota Troika G20 saat ini terdiri dari Indonesia sebagai presiden berjalan, Italia sebagai presiden sebelumnya, dan India sebagai presiden selanjutnya. Dalam berbagai tinggat pertemuan G20, Indonesia telah berkontribusi aktif mulai dari tingkat *working group* hingga Konferensi Tingkat Tinggi G20. Sebagai pemegang kendali kepemimpinan terdapat hal unik yang dilakukan Indonesia, tak hanya berfokus pada sector ekonomi saja namun juga terkait dengan isu kelestarian lingkungan. Seperti pertemuan ke-3 Deputi Lingkungan dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim (*Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group*) yang berlangsung di Bali pada 29-30 Agustus 2022. Indonesia mengajak negara G20 untuk berkomitmen dalam pengurangan 50% lahan terdegradasi pada tahun 2040 sesuai dengan *Global Initiative* yang dicanangkan pada tahun 2020. Peran negara-negara G20 sangat dibutuhkan untuk memperkuat aksi dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati, sumber daya air, penanganan sampah laut, konservasi laut, dan pendanaan berkelanjutan melalui aksi nasional dan kerja sama multilateral.

G20 berkomitmen untuk memperkuat regulasi yang mendorong sektor swasta dan lembaga keuangan untuk berpartisipasi dalam pendanaan. Melalui forum G20, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menghasilkan kebijakan yang menggabungkan upaya negara anggota G20 untuk menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim serta memberikan kontribusi

---

<sup>39</sup>*Loc Cit*, Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023) hal 13

kepada pencapaian tujuan dan target lingkungan global. Prinsip yang digunakan dalam kebijakan ini adalah *leading by example, recover together, recover stronger*. Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa agenda prioritas yang sejalan dengan kepentingan nasional sekaligus mendukung kepentingan negara-negara berkembang serta memperkuat partisipasinya dalam kebijakan-kebijakan global agar tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar. Melalui forum G20, tanggung jawab yang diterima oleh Indonesia menjadikan segala keputusan ataupun kebijakan yang dikeluarkan dapat berdampak besar bagi pembangunan ekonomi internasional. Oleh karena itu, kesempatan seperti ini tidak boleh disia-siakan agar citra Indonesia semakin dikenal oleh banyak negara.

### **3.2 Indonesia dalam Presidensi G-20**

Presidensi G-20 adalah sebuah forum kerja sama yang mengikutsertakan 19 negara utama dan Uni Eropa. Negara-negara yang tergabung dalam forum ini antara lain : Afrika Selatan, Amerika Serikat, Italia, Kanada, Meksiko, Jerman, Argentina, Inggris, India, Perancis, Korea Selatan, Turki, Brazil, Arab Saudi, Tiongkok, Australia, Rusia, Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia pada tahun 2021 berkesempatan dan secara resmi memegang Presidensi atau sebagai ketua dalam forum G-20 sejak tanggal 1 Desember 2021- November 2022 dengan mengusung tema “ *Recover Together, Recover Strong*”. Kesempatan serta kepercayaan besar yang diberikan kepada Indonesia ini disambut dengan sangat baik sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu memegang amanah dan tanggung jawab besar ini. Selama perannya sebagai presidensi forum G-20 ini, Indonesia harus fokus pada

peningkatan produktivitas, menciptakan ekonomi global yang lebih stabil dan tangguh, mendorong dan memperkuat pertumbuhan yang menyeluruh dan berkelanjutan, mempertahankan kemitraan yang sehat, dan meningkatkan kepemimpinan global.<sup>40</sup>

Indonesia telah mengambil bagian dalam forum kerja sama, menunjukkan keinginan yang kuat untuk membangun kesejahteraan bersama di dalam dan di luar negeri. Indonesia berusaha keras untuk mendukung inisiatif nyata yang membantu memperbaiki keadaan global dan menjadi lebih kuat. *Recover Together, Recover Stronger*. Selain menumbuhkan rasa kerja sama, partisipasi Indonesia dalam forum juga menjadi sinyal yang kuat bahwa Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Membutuhkan bantuan dari negara lain terutama dalam menangani masalah khusus, seperti kerja sama untuk mengatasi krisis iklim, penanganan pandemi COVID-19, dan sebagainya. Sama seperti negara-negara lain di dunia yang masih bergantung pada negara lain dalam beberapa hal, termasuk Indonesia.<sup>41</sup>

Posisi Indonesia dalam G20 sesuai dengan citra yang diproyeksikan dari kekuatan menengah, untuk memberikan pengaruh semacam ini. Indonesia mencoba menjadi suara pembangunan negara dalam menetapkan agenda kepresidenan G20. Dengan lebih dua tahun ke pandemi COVID-19, Indonesia merasa ada kesenjangan yang semakin besar antara dua negara-negara kaya dan ekonomi berkembang. Dengan ini menjelaskan mengapa Indonesia berjuang untuk jalan inklusivitas, dimana tidak ada negara yang tertinggal dalam mengejar

---

<sup>40</sup>Bandung, S. (2022,11). Social Interest dan Relevansinya Terhadap Keterlibatan Indonesia dalam G-20. In *Forum* (Vol. 51, No. 2, pp. 260-273).

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 268

pemulihan, baik itu ekonomi atau kesehatan. Dengan adanya G20 ini, Indonesia bertujuan untuk membangun global yang lebih responsif dan inklusif sistem perawatan kesehatan, dimana ia dapat mengoordinasikan dana kesehatan dan kapasitas untuk negara-negara yang tidak memiliki salah satu dari itu dan ini juga melihat masalah meningkat efisiensi dalam tata kelola melalui implementasi transformasi digital. Dengan mengizinkan semua elemen masyarakat untuk terhubung secara digital, pemerintah dapat merespon mereka kebutuhan lebih cepat, sehingga meningkatkan efisiensi.<sup>42</sup>

*Last but not least*, adalah untuk memastikan bahwa generasi memandang masih memiliki dunia untuk dijaga. Oleh karena itu, Indonesia mendorong pendekatan yang lebih baik untuk transisi energi yang memungkinkan semua negara terlibat, melalui penggunaan pendanaan yang berkelanjutan, dan akses yang lebih mudah ke teknologi.<sup>43</sup> Tema kepresidenan G20 Indonesia adalah pulih bersama, pulih lebih kuat. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia ingin memimpin G20 untuk membangun upaya bersama untuk membuat pemulihan yang lebih kuat dari krisis COVID-19 dan memungkinkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh dunia. Hasil utama yang diharapkan adalah strategi keluar yang komprehensif untuk mendukung pemulihan, dengan rencana aksi yang konkrit dan dapat dilakukan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Mantong, A. W., & Kembara, G. (2022). Indonesia's G20 Presidency and the War in Ukraine. Retrieved from Istituto Affari Internazionali: <https://www.iai.it/en/publicazioni/indonesias-g20-presidency-and-war-ukraine>.

<sup>43</sup>*Ibid*,

<sup>44</sup>Hermawan, Purwadi Y (2022, 1 31), "The G20 Presidency of Indonesia : With Great Trust Comes Great Responsibility" diakses <https://th.boell.org/en/2022/01/31/g20-Indonesia-2022>

Tiga agenda besar telah terpilih sebagai pilar utama untuk merumuskan strategi untuk mempercepat pemulihan yang berkelanjutan, inklusif dan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi dan digital, serta transisi energi. Untuk agenda pertama, perhatian khusus akan diberikan pada upaya untuk memastikan ketahanan sistem kesehatan global dan pengembangan mekanisme sumber daya global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Inisiatif untuk menyelesaikan standar protokol kesehatan global, transfer teknologi dan pemerataan akses produksi vaksin, terapeutik, dan diagnostik. Secara khusus, Indonesia menawarkan untuk berperan sebagai pusat transfer teknologi vaksin moderna COVID-19 ke Asia, sebagai tujuan jangka pendek, G20 akan membantu mencapai target ambisius 70% dari total populasi yang akan divaksinasi pada pertengahan 2022. Dalam jangka panjang, agenda ini akan memperkuat tata kelola dan arsitektur kesehatan global di era pasca pandemi.<sup>45</sup>

Agenda kedua adalah transformasi ekonomi dan digital yang dirancang khusus untuk memulihkan tatanan ekonomi global pasca pandemi dengan memanfaatkan digitalisasi. Indonesia akan memimpin G20 untuk fokus menciptakan nilai ekonomi digital guna mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya untuk mendukung pengembangan dan inklusi keuangan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Fokus lainnya adalah pengembangan literasi dan keterampilan digital, digitalisasi sektor-sektor yang menjadi sumber potensi pertumbuhan ekonomi baru untuk percepatan pemulihan ekonomi dan perlunya

---

<sup>45</sup> *Ibid*,

tata kelola data global dan penciptaan nilai ekonomi melalui pemanfaatan teknologi digital.<sup>46</sup>

Agenda ketiga adalah transisi energi yang ditujukan untuk memperkuat sistem energi berkelanjutan global dan transisi yang berkeadilan isu-isu prioritas meliputi perluasan akses energi yang berfokus pada memasak bersih yang layak, dan intensifikasi pembiayaan transisi energi. Target langsung kepresidenan adalah mencapai kesepakatan global tentang percepatan transisi energi. Kesepakatan ini akan berkontribusi pada agenda jangka panjang untuk mendukung komitmen global untuk mencapai komitmen emisi nol bersih. Kepresidenan Indonesia ingin menunjukkan bahwa G20 akan mengambil tanggung jawab yang lebih tinggi untuk mendukung komitmen para pemimpin global di 26<sup>th</sup> *UN Climate Change Conference of the Parties (COP26)*. Presiden G20 Indonesia akan menyelenggarakan sekitar 150 pertemuan di berbagai tingkatan termasuk satu KTT, 19 pertemuan menteri, 7 pertemuan Sherpa (deputi), 70 pertemuan kelompok kerja, dan 51 pertemuan kelompok keterlibatan, serta beberapa acara sampingan relevan.<sup>47</sup>

Presidensi Indonesia mengundang negara-negara tamu dan lembaga internasional untuk berpartisipasi berdasarkan prinsip inklusivitas. Presiden Joko Widodo berulang kali menekankan bahwa prioritas utama kepemimpinan Indonesia di G20 adalah inklusivitas, dengan tujuan untuk mewujudkan "tidak ada yang tertinggal". Visinya adalah presidensi G20 yang menguntungkan semua pihak, termasuk negara berkembang, negara pulau-pulau kecil, serta kelompok

---

<sup>46</sup>*Ibid*,

<sup>47</sup>*Ibid*,

rentan, bukan hanya untuk kepentingan anggota. Untuk alasan ini, Indonesia juga sangat membantu negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia. Hal ini memberikan representasi yang lebih luas kepada G20, selain mencerminkan semangat inklusif.<sup>48</sup>

Pada presidensi G20 Indonesia, sembilan negara yang diundang adalah Spanyol, sebagai ketua Uni Afrika, sebagai ketua Agensi Pengembangan Uni Afrika-NEPAD (AU-NEPAD), Ketua Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Belanda, Singapura, persatuan Emirat Arab, sebagai ketua Komunitas Karibia (CARICOM), dan sebagai ketua Forum Pulau Pasifik (PIF). Selain itu, ada sepuluh organisasi internasional yang diundang: *Asian Development Bank (ABD)*, *Financial Stability Board (FSB)*, *International Labour Organization (ILO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *Islamic Development Bank (ISBD)*, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *World Bank*, *World Health Organization (WHO)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *United Nations*.<sup>49</sup>

Dua pilar diskusi G-20 adalah pilar keuangan (*track finance*) dan Sherpa Track, yang membahas konflik ekonomi dan pembangunan non keuangan. Setiap pilar yang disebutkan di atas memiliki kelompok kerja yang disebut *Working Groups*. Selain kedua pilar tersebut, juga ada *Engagement Groups*, yang terdiri dari sepuluh kelompok komunitas dari berbagai komunitas profesional yang berkumpul untuk membahas berbagai topik diskusi. Setiap kelompok keterlibatan

---

<sup>48</sup>Kemlu.go.id (2022, 10/1), "Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20 tahun 2022" di akses pada <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia>

<sup>49</sup>*Ibid*,

memiliki peran penting dalam pemulihan global, terutama melalui proposal kebijakan yang tepat untuk para pemimpin G20.<sup>50</sup>

Tidak diragukan lagi, presidensi G20 memiliki banyak keuntungan strategis dari berbagai kegiatan yang diadakan sepanjang tahun ini. Aspek ekonomi, politik luar negeri, dan pembangunan sosial dapat digunakan untuk mengukur potensi ini. Pertama, presidensi G20 diharapkan memiliki efek langsung pada perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Kedua, sebagai ketua G20, Indonesia diharapkan dapat mendorong kerja sama dan mencapai hasil konkret terkait ketiga sektor prioritas pemulihan yang strategis. Ini memberikan momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kepercayaan dan kredibilitas internasional dan memimpin pemulihan global. Kredibilitas sangat penting dalam diplomasi dan politik luar negeri.<sup>51</sup>

Ketiga, pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan Presiden G20 memberikan momentum untuk menunjukkan bahwa "Indonesia terbuka untuk bisnis." Berbagai acara dan acara akan menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan peluang investasi di sana. Diharapkan bahwa ini akan memiliki dampak yang lebih besar pada ekonomi karena kontribusi dari sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif, serta usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal.<sup>52</sup>

Sebagai tuan rumah pada konferensi G20, Indonesia memiliki kesempatan unik untuk membangun momentum internasional menuju masa depan energi yang berkelanjutan, dan merencanakan langkah-langkah penting selanjutnya untuk

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid,*

<sup>52</sup> *Ibid,*

mempercepat penghentian penggunaan tenaga batu bara secara global, sambil tetap memprioritaskan ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi akan tantangan pandemi covid 19, pemanasan global dan juga krisis ekonomi global. Banyak yang akan melihat ke forum G20 untuk mendapatkan sinyal yang jelas bahwa ekonomi terbesar dunia siap untuk berinvestasi dalam solusi lintas sektor yang membatasi dampak pemanasan global dan mempercepat pemulihan ekonomi. Negara-negara G20 telah membuat komitmen net-zero termasuk Rusia, Arab Saudi, dan Indonesia.<sup>53</sup>

Indonesia memberikan banyak harapan dunia pada COP26, karena menyapakai unsur-unsur pernyataan transisi batu bara global ke Energi Bersih, dan menteri keuangan Sri Mulyani menyoroti kemungkinan penghentian penggunaan batu bara pada tahun 2045, dengan dukungan internasional yang tepat. Pada COP 26, Indonesia berkomitmen lebih lanjut untuk menghentikan secara bertahap penggunaan tenaga batu bara dan menghapus subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien. Banyak analisis energi sangat antusias dengan bergabungnya mereka dalam pernyataan Transisi Batubara Global ke Energi bersih. Selama 20 tahun terakhir sektor publik dan swasta Indonesia telah berjuang sangat keras untuk memperluas akses listrik ke puluhan juta penduduk Indonesia. Melanjutkan dan memenuhi permintaan yang harus meningkat di bidang transportasi dan industri akan tetap menjadi tantangan utama bagi pemerintah, tetapi peningkatan pesat listrik bersih adalah pertahanan terbaik untuk

---

<sup>53</sup> Antara News.com (2022, 9/13), "G20 CMM: Indonesia leads cultural diplomacy for sustainable living" diakses pada <https://en.antaranews.com/news/249565/g20-cmm-indonesia-leads-cultural-diplomacy-for-sustainable-living>

menghadapi tantangan ketahanan energi, baik untuk Indonesia maupun negara-negara secara global.<sup>54</sup>

Indonesia memimpin G20 dalam situasi ketidakpastian global yang menantang dan kompleks akibat pandemi Covid-19 dengan agenda prioritasnya seputar arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital serta transisi energi. Presidensi G20 dinilai penting bagi Indonesia bukan hanya mencerminkan kepercayaan dan kehormatan di dalam negeri, tetapi juga tanggung jawab dan peluang untuk berkontribusi lebih banyak pada pemulihan ekonomi global dan selaras dengan kepentingan ASEAN, Pasifik dan negara-negara berkembang. Dibawah presidensi Indonesia, G20 harus dapat merumuskan strategi pemulihan terbaik dan komprehensif untuk memulihkan produktivitas dan pertumbuhan yang kuat secara efektif. Disaat yang bersamaan, G20 bertanggung jawab akan landasan yang kokoh bagi percepatan pertumbuhan hijau sejalan dengan komitmen para pemimpin global yang dijanjikan pada “2021 United Nations Climate Change Conference (COP26)” atau yang lebih dikenal sebagai Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021.<sup>55</sup>

Pada puncak transisi energi global, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mencoba mendorong G20 untuk mendukung dan mempercepat transisi, sebagai presidensi G20. Indonesia sebagai negara presidensi dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan dampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia sekaligus menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kanca internasional,

---

<sup>54</sup>*Ibid*,

<sup>55</sup>Yulius, Purwadi H (2022, 1/31) “ *The G20 Presidency of Indonesia : With great Trust Comes Great Responsibility* ” diakses pada <https://th.boell.org/en/2022/01/31/g20-Indonesia-2022>

khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Selain itu, dari prespektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20.<sup>56</sup>

Secara tidak langsung, Indonesia menjadi perhatian global, terutama para pelaku ekonomi dan ekonomi, sebagai hasil dari Forum G20. Ini dapat digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan para pelaku ekonomi dalam dan luar negeri setelah pandemi. Pertemuan G20 di Indonesia juga memungkinkan Indonesia untuk mempromosikan pariwisata dan produk berkualitas tinggi ke pasar global, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Bi.go.id (2020) “G20 Presidency of Indonesia 2022” diakses pada <https://www.bi.go.id/en/G20/default.aspx>

<sup>57</sup>*Ibid*,

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G., & Tanaga, S. (2011). Peran Indonesia dalam G-20. Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia. Friedrich Ebert Stiftung. Jakarta Selatan

Routledge. Carlsnaes, e. W. (2013). Handbook Hubungan Internasional. Bandung: Nusamedia.

Setiawan, A. (2016). *Diktat Teori dan Praktik Diplomasi*. Universitas Muhammadiyah. Jakarta

### SKRIPSI :

Bahtiar,W.A.(2019).*Kepentingan Nasional Jepang Dalam The United Nations Framework Convention On Climate Change : Skema Joint Crediting Mechanism Tahun 2012-2015*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta.

Putra,R.M. (2020). *Analisis Kepentingan Nasional Jepang Dalam Kerja sama Energi Nuklir Dengan India Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah-Jakarta.

### JURNAL :

Alfajri,S.I (2017). Kepentingan Indonesia Mengekspor Ikan Tuna ke Amerika Serikat Tahun 2012-2015.*JOM FISIP Vol.4 No.2 Oktober 2017, hlm 3*.

Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalamPemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 131-148.

Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47-68.

Avivi,Y & Siagian,M (2020). Kepentingan Indonesia Dalam Kerja sama Bilateral dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Parnertship Agreement (Ijepa). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.3 No.1 (2020), hlm.50*.

- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109-115.
- Bandung, S. (2022,11). Social Interest dan Relevansinya Terhadap Keterlibatan Indonesia dalam G-20. *In Forum (Vol. 51, No. 2, pp. 260-273)*.
- Fathun, L. M. Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20. *Indonesian Perspective*, 2022(1).
- Julina, S. (2022). Komunikasi Internasional Indonesia Sebagai Presidensi G-20 Indonesia 2022 Ditinjau Dari Perspektif Diplomatik. *Jurnal Citra*, 10(1).
- Sukawiyana, A., Astari, A. A. E., & Indiani, N. L. (2022). Aktualisasi Perekonomian Indonesia Dalam Presidensi G20 Peluang Bertumbuh Atau Tren?(Studi Analisis Ekonomi). *Nusantara Hasana Journal*, 2(3), 196-218.
- Suryawijaya, T. W. E., Priono, S. A., & Ingsih, K. (2022). G20: Vehicle for Indonesia's Economic Recovery (No. 8cvjp). *Center for Open Science*.
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12-23.
- Ibrahim, H. R. (2022). Strengthening Indonesia's Diplomacy in Economic Recovery and Mitigating Budget Management In Developing Countries Through The G20 Dialogue Forum. *Journal of Social Political Sciences*, 3(2), 210-222.
- Nainggolan, H. M., Permatasari, N. I., & Hikmalia, W. (2022). Pentingnya Juru Bicara Sebagai Komunikator Politik Pada Presidensi G20 Indonesia. *JURNAL HERITAGE*, 10(2), 172-187.
- Wulandari, P. (2010). G20 dan Krisis Finansial Global. *Jurnal ISIP*, 9(1). Hlm 52

#### **ARTIKEL & WEBSITE :**

- Antara News.com (2022, 9/13), “G20 CMM: Indonesia leads cultural diplomacy for sustainable living” diakses pada <https://en.antaranews.com/news/249565/g20-cmm-indonesia-leads-cultural-diplomacy-for-sustainable-living>
- Bi.go.id (2020) “ G20 Presidency of Indonesia 2022” diakses pada <https://www.bi.go.id/en/G20/default.aspx>

- Berridge, G. R. (2022). *“Theory and Practice: Multilateral Diplomacy”* diakses dari [https://asef.org/wp-content/uploads/2020/10/ModelASEM\\_Diplo\\_MultilateralDiplomacy.pdf](https://asef.org/wp-content/uploads/2020/10/ModelASEM_Diplo_MultilateralDiplomacy.pdf)
- Debora, Chatrine (2022, 3/1), *“Diplomasi Indonesia dalam Kepemimpinan G20 Tahun 2022”* diakses pada <https://dip.or.id/2022/03/01/diplomasi-indonesia-dalam-kepemimpinan-g20-tahun-2022/>
- Febrylian, Bentang (2021, 11 8) *Indonesia Terpilih Menjadi Presiden G20 Karena Berhasil Kendalikan Pandemi*. Diakses dari [covid19.go.id](https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-indonesia-terpilih-menjadi-presiden-g20-karena-berhasil-kendalikan-pandemi) <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-indonesia-terpilih-menjadi-presiden-g20-karena-berhasil-kendalikan-pandemi>
- Hanzel, Mattew (2011, 12 20) *Simun 2: Diplomasi Multilateral*. Diakses dari <https://matthewhanzel.com/2011/12/20/simun-2-diplomasi-multilateral/>
- Hermawan, Purwadi Y (2022, 1 31), *“The G20 Presidency of Indonesia : With Great Trust Comes Great Responsibility”* diakses <https://th.boell.org/en/2022/01/31/g20-Indonesia-2022>
- Kompasiana, (2015, 6 26). *Multilateral Diplomacy*. Diakses dari [Kompasiana.com](https://www.kompasiana.com/mrasyaaditya/550069a7a333115b745109fa/multilateral-diplomacy) <https://www.kompasiana.com/mrasyaaditya/550069a7a333115b745109fa/multilateral-diplomacy>
- Kemenkeu (2020). *Apa itu G20 dan Manfaatnya untuk Indonesia*. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/14747/Apa-itu-G20-dan-manfaatnya-untuk-Indonesia.html>
- Kemlu.go.id (2022, 10/1), *“Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama dalam Presidensi G20 tahun 2022”* di akses pada <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3288/berita/presidensi-g20-indonesia>
- Mantong, A. W., & Kembara, G. (2022). *Indonesia’s G20 Presidency and the War in Ukraine*. Retrieved from [Istituto Affari Internazionali](https://www.iai.it/en/pubblicazioni/indonesias-g20-presidency-and-war-ukraine) diakses dari <https://www.iai.it/en/pubblicazioni/indonesias-g20-presidency-and-war-ukraine>.
- Muthiariny, Dewi Elvia (2022 11/16), *“Jokowi Unveils 4 Solid Result from G20 Summit”* diakses dari <https://en.tempo.co/read/1657622/jokowi-unveils-4-solid-results-from-g20-summit>
- Nugraha, J *“Diplomasi Ekonomi Indonesia, G20 dan Tantangan Global Indonesia tahun 2013”* diakses dari [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Diplomasi\\_ekonomi\\_Indonesia\\_G20\\_dan\\_tantangan\\_global\\_tahun\\_2013.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Diplomasi_ekonomi_Indonesia_G20_dan_tantangan_global_tahun_2013.pdf)

Syahrazi, Putri R & Valencia (2020), “ Multilateral Diplomacy And Its Reflection In G20” diakses dari [https://www.academia.edu/43132036/Multilateral\\_Diplomacy\\_And\\_Its\\_Reflection\\_In\\_G20](https://www.academia.edu/43132036/Multilateral_Diplomacy_And_Its_Reflection_In_G20)

Triadha, Achmad Fauzan (2022, 8 15). *7 Manfaat sebagai Presidensi G20 bagi Indonesia dan Dunia*. diakses dari <https://iap2.or.id/7-manfaat-sebagai-presidensi-g20-bagi-Indonesia-dan-dunia/>

Yulius, Purwadi H (2022, 1/31) “ *The G20 Presidency of Indonesia : With great Trust Comes Great Responsibility* ” diakses pada <https://th.boell.org/en/2022/01/31/g20-Indonesia-2022>